

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PENERIMAAN DAERAH DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh:
GITA LORENA
NIM. 01043120060**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

S
338.907
lor
a
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



SKRIPSI

**ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PENERIMAAN DAERAH DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

R. 6844
1. 17226



Diajukan Oleh:

**GITA LORENA
NIM. 01043120060**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GITA LORENA
NIM : 01043120060
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PENERIMAAN
DAERAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 29 April 2008 Ketua


**: Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 132050494**

Tanggal 25 April 2008 Anggota


**: Drs. M. Syirod Saleh, M.Si
NIP. 131412510**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : GITA LORENA
NIM : 01043120060
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN
PENERIMAAN DAERAH DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 12 Mei 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

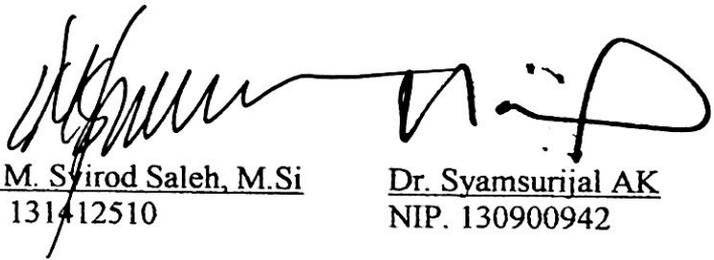
Inderalaya, 19 Mei 2008

Ketua,



Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 132050494

Anggota,



Drs. M. Sjirod Saleh, M.Si
NIP. 131412510

Anggota,

Dr. Syamsurijal AK
NIP. 130900942

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132020493

Motto:

Jika pagi tiba, jangan menunggu sore

Dan jika sore tiba, janganlah menunggu hingga waktu pagi

(Sabda Rasulullah SAW)

Lihatlah hari ini dan hiduplah

Sebab ia adalah kehidupan dari kehidupan

Karena hari kemarin tak lebih dari sebuah mimpi

Esok Hari hanyalah bayangan

Ketika hari ini anda hidup sempurna

Membuat hari kemarin impian yang indah

Membuat setiap hari esok bayangan yang penuh harapan

Maka lihatlah hari ini dan hiduplah

(Kalidasa)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku tercinta**
- ❖ **Saudaraku (Kakak, Abang dan Adikku)
tersayang**
- ❖ **Teman-temanku terkasih**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul "*Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah*", sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penulisan ini juga bertujuan agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan atau tambahan literatur bagi pada akademisi maupun para pembaca umumnya.

Tulisan ini berisi mengenai pemecahan terhadap masalah yang diangkat yaitu bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan dengan menerapkan model kausalitas Granger dan data sekunder.

Hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah dibahas pada bab I, selanjutnya sebagai landasan dalam menganalisis penulis menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik bahasan yang dipaparkan dalam bab II. Metodologi penelitian dan tehnik analisis dipaparkan dalam bab III. Pada bab IV terdapat gambaran umum Provinsi Sumatera Selatan dan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian, data-data yang digunakan penulis sebagai acuan untuk menganalisis, yakni periode tahun 1996 sampai tahun 2006 yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil dan penelitian yang disajikan pada bab V membahas analisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan model analisis kausalitas Granger. Pada bab terakhir, penulis merangkum hasil penelitian dalam beberapa kesimpulan dan memberikan sejumlah saran yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Palembang, Mei 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***"Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan"***.

Pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi petunjuk dan nasihat hingga selesainya skripsi ini khususnya kepada :

1. Kedua Orangtuaku tercinta, terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, karena kalian aku ada di dunia ini, maafkan anakmu yang baru bisa memersembahkan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA, selaku Rektor Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Dr. H. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang dan dosen penguji pada ujian komprehensif.
4. Bapak Dr. Taufiq Marwa, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
5. Bapak Dr. Azwardi, M.Si selaku pembimbing skripsi I. Terima kasih atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama proses pembuatan skripsi.
6. Bapak Drs. M. Syirod Saleh, M.Si selaku pembimbing skripsi II. Terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan selama proses pembuatan skripsi.
7. Bapak Imam Asngari, SE, M.Si selaku pembimbing akademik, terima kasih atas semua bantuannya selama ini.
8. Seluruh dosen pengajar yang Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya telah memberikan pengetahuan dan bantuan selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu saya.
10. Buat semua staf Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan data.
11. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan data.
12. Kakak (K'Ria), abang (Bang Remon) dan adikku (Mela), terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, akhirnya aku selesai juga kuliahnya.
13. Ke-11an (NorHa, Cub8y, Ranie dodoT, Mira IduT, Ala, Hilda, Aming, Yulia, Intan dan TiuR) Terima kasih atas dukungannya selama ini.
14. Buat temanku Ucuup (Vadaa) ma kasih ya udah jadi Temen yang gak pernah Lupa ama Gono, saat senang maupun susah, We're Friends Forever!
15. Sodara se-PA Pak Imam (Tobo, Adi, TPS, Irfan, Meita, Aji, Andi), senangnya bisa jadi sodari se-PA kalian! Kalian Sodara PA terhebat di dunia.
16. Tri, Ratih, Fattah, Umi, Piyek, Charles, Salwah, Berti, Semangat dan selamat berjuang nulis Skripsi!
17. Metta, Citra Yuni, Asti dan Mei. Hallo calon 'PENGACARA' selamat datang di dunia kerja!
18. Teman-teman se-angkatan EP 04, terima kasih atas dukungannya selama ini dan mari berjuang bersama.

Palembang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow	11
2.1.2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Sollow-Swan)	12
2.1.3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	13
2.1.4. Teori Penerimaan Pemerintah	15
2.1.5. Teori Pengeluaran Pemerintah	18
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Kerangka Pemikiran	25
2.4. Hipotesis	26

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian	27
3.2. Jenis dan Sumber Data	27



3.3. Metode Pengumpulan Data	27
3.4. Teknik Analisis.....	28
3.5. Batasan Operasional Variabel	33
 BAB IV. GAMBARAN UMUM	
4.1. Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan..	34
4.2. Perkembangan Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	39
4.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	45
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Pengaruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	49
5.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah	52
5.3. Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	55
5.4. Hasil Regresi Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	58
5.4.1. Hubungan Antara Penerimaan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi	59
5.4.2. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi	63
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	68
6.2. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. : PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006 ADHK 2000	2
Tabel 1.2. : Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006	5
Tabel 1.3. : Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1996/1997 sampai 2006	7
Tabel 1.4. : Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1996/1997 sampai 2006	8
Tabel 4.1. : PDRB Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997 sampai 2006 ADHK 2000	37
Tabel 4.2. : Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB dengan Migas Sumatera Selatan 1997 sampai 2006 ADHK 2000	38
Tabel 4.3. : Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Otonomi Periode 1996 sampai 2001	40
Tabel 4.4. : Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Setelah Otonomi Periode 2002 sampai 2006	43
Tabel 4.5. : Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1996 sampai 2006	45
Tabel 5.1. : Uji Kausalitas Granger Pada Lag1 Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah	57
Tabel 5.2. : Hasil Regresi Penerimaan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi..	59
Tabel 5.3. : Hasil Regresi Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Daerah	62
Tabel 5.4. : Hasil Regresi Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Pemerintah.....	63
Tabel 5.5 : Hasil Regresi Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. : Teori Pertumbuhan Neo-Klasik	12
Gambar 2.3. : Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1. : Kontribusi Sumber Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Otonomi Periode 1996 sampai 2001	41
Gambar 4.2. : Persentase Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dengan Migas dan Tanpa Migas Periode Tahun 1997 Sampai 2006.....	35
Grafik 4.2. : Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997 Sampai 2006.....	44
Grafik 4.3. : Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997 Sampai 2006.....	48

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1996 - 2006. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan metode regresi linier sederhana dan uji kausalitas Granger.

Hasil regresi linier menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah dalam periode penelitian dan hasil dari uji kausalitas granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi ketika penerimaan daerah menyebabkan adanya hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketika pengeluaran pemerintah menyebabkan adanya hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien tidak sama dengan nol ($dj \neq 0$ dan $dj \neq 0$) dan nilai F statistik yang lebih besar dari F tabel ($7,6160 > 4,46$ dan $9,3062 > 4,46$).

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, pengeluaran pemerintah, kausalitas Granger

Abstract

The main object of this research is to analyze the causality relationship between economic growth with regional revenue and government expenditure in South Sumatera for period of 1996 - 2006. The data used in this study are secondary data, by using a simple linear regression equation and Granger causality test.

The result of linear regression shows that there are indeed two causative directions between economic growth with regional revenue and government expenditure in the period of research and the result of Granger causality test shows that there are indeed one causative directions between regional revenue dan government expenditure with economic growth when regional revenue does Granger cause economic growth and government expenditure does Granger cause economic growth, it can be seen from coefficients are not zero ($d_j \neq 0$ and $d_j \neq 0$) and the statistic grade F are bigger than the table grade F ($7,6106 > 4,46$ and $9,3062 > 4,46$).

Keywords: Economic growth, regional revenue, government expenditure, Granger causality.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu keharusan bagi suatu negara agar tidak tertinggal dari negara lainnya. Demikian pula halnya bagi bangsa Indonesia, melalui pembangunan nasional maka cita-cita dan tujuan nasional akan tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di sektor ekonomi (Tambunan, 2001: 1). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Hal ini sesuai dengan perekonomian Indonesia yang bersifat demokrasi (Hasibuan, 2001: VI-27).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan cara menggiatkan pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bergantung kepada berbagai faktor antara lain kebijakan pemerintah. Suatu daerah harus dapat mengenali dan mengidentifikasi secara tepat faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah atau sebaliknya.



Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi barang-barang dan jasa-jasa yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian dan pembangunan suatu daerah. Untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya digunakan produk domestik regional bruto (PDRB).

Tabel 1.1
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
Periode 1996 sampai 2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun	PDRB Migas (juta rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Tanpa Migas (juta rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1996	44.364.049	-	31.473.479	-
1997	47.957.856	8,03	34.239.951	8,79
1998	50.251.257	4,85	36.296.687	6,01
1999	46.928.824	-6,61	33.186.131	-9,37
2000	48.419.231	3,08	33.692.602	1,53
2001	51.285.821	5,59	34.898.862	3,58
2002	43.643.276	3,79	30.083.324	4,44
2003	45.247.401	3,67	31.810.725	5,74
2004	47.344.395	4,63	33.969.083	6,78
2005	49.633.536	4,83	36.317.674	6,91
2006	52.215.287	5,20	38.971.463	7,31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan. *Sumatera Selatan Dalam Angka*. Data diolah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya, seperti yang terlihat dari tabel di atas. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 1997 yakni sebesar 8,03 persen untuk pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB dengan migas, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang diukur dari PDRB tanpa migas terjadi pada tahun 2006 yakni sebesar 9,79 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1999 yakni sebesar minus 6,61 persen diukur dari PDRB dengan

migas dan minus 9,37 persen bila diukur dari PDRB tanpa migas. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah demi menunjang percepatan pembangunan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dengan tujuan akhir yang sama dengan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat berupaya bersama-sama mengambil inisiatif melakukan pembangunan daerahnya dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menaksir potensi sumber daya - sumber daya yang diperlukan untuk merangsang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2005: 108-109).

Proses pembangunan perlu ditunjang oleh suatu perencanaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan mengenai pengeluaran dan penerimaan dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun (Suparmoko, 2002: 26). Anggaran untuk daerah tersebut dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD, pada jangka waktu satu tahun yang meliputi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Yuwono, dkk, 2005: 92).

Struktur APBD sendiri merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dan transfer. Menurut Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 dan Kepmendagri No. 59 Tahun 2007, pendapatan daerah (penerimaan daerah) adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, atau semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diatur sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan belanja daerah (pengeluaran daerah) adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berikut ini adalah data APBD Propinsi Sumatera Selatan tahun 2006. Melalui data APBD tersebut dapat diketahui besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2006 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan	1.867.311,82
	Pendapatan Asli Daerah	743.056,58
	a. Pajak Daerah	650.294,05
	b. Retribusi Daerah	5.575,68
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah	21.209,40
	d. Lain-Lain PAD yang Sah	65.977,44
	Dana Perimbangan	1.124.255,23
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	702.874,23
	b. DAU	421.381,00
	c. DAK	-
	Lain-lain Penerimaan yang Sah	-
2.	Pengeluaran (Belanja)	1.741.587,20
	a. Belanja Aparatur Daerah	475.803,55
	b. Belanja Pelayanan Publik	904.794,45
	c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan	356.397,58
	d. Belanja Tidak Tersangka	4.591,62
	Surplus / Defisit	125.724,62
3.	Pembiayaan	
	Penerimaan Daerah	259.900,77
	Pengeluaran Daerah	385.625,39
	Surplus / Defisit	(125.724,62)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2007. *Sumatera Selatan dalam angka 2007*.

Berdasarkan APBD Propinsi Sumatera Selatan tahun 2006 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Propinsi Sumatera Selatan 2006 sebesar Rp1.867.311,82 juta dengan kontribusi terbesar penerimaan berasal dari dana

perimbangan yakni sebesar Rp 1.124.255,23 juta yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 704.874,23 juta dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 421.381 juta. DAU tersebut dialokasikan untuk menunjang proses pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan.

Penerimaan daerah lain selain dana perimbangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang tercatat sebesar Rp 743.056,58 juta. Sebagian besar pendapatan tersebut masih didominasi oleh pendapatan pajak daerah yakni sebesar Rp 650.294,05 juta sedangkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, laba perusahaan milik negara dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar yakni hanya sebesar Rp 5.575,68 juta, Rp 21.209,40 juta dan Rp 65.977,44 juta.

Pada sisi pengeluaran, pada tahun 2006 realisasi pengeluaran daerah sebesar berasal dari Rp 1.741.587,20 juta yang dikeluarkan melalui beberapa pos kegiatan antara lain belanja aparatur daerah 27,32 persen, belanja pelayanan publik 51,95 persen, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 20,46 persen serta belanja tidak terduga 0,27 persen. Besarnya surplus yang terjadi pada tahun 2006 sebesar Rp 125.724,62 juta yang setara dengan defisit realisasi pembiayaan APBD yakni sebesar Rp 125.724,62 juta.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu unsur terpenting dari APBD adalah penerimaan daerah. Penerimaan daerah merupakan harta kekayaan bagi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

Tabel 1.3
 Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
 Periode 1996/1997 sampai 2006

Tahun	Penerimaan Daerah (juta rupiah)	Pertumbuhan Penerimaan Daerah (%)
1996/1997	132.773	-
1997/1998	271.993	104,86
1998/1999	295.118	8,50
1999/2000	487.606	65,22
2000	561.428	15,13
2001	674.443	20,13
2002	806.178	19,53
2003	1.042.002	29,25
2004	1.088.213	4,43
2005	1.392.063	27,92
2006	1.867.311	34,14

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan. *Sumatera Selatan Dalam Angka*. Data diolah.

Penerimaan daerah Propinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan daerah paling tinggi terjadi pada tahun 1997/1998 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 104,86 persen. pertumbuhan paling kecil terjadi pada tahun 2004 dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 4,43 persen.

Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu daerah selain unsur penerimaan terdapat unsur penting lain di dalam APBD yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terbagi atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin lebih bersifat pengeluaran yang konsumtif, sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat produktif. Inilah yang menyebabkan pengeluaran pembangunan lebih dikenal sebagai investasi pemerintah, karena digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang ada di suatu daerah.

Tabel 1.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
Periode 1996/1997 sampai 2006

Tahun	Pengeluaran Rutin (juta rupiah)	Pengeluaran Pembangunan (juta rupiah)	Total Pengeluaran (juta rupiah)	Pertumbuhan Pengeluaran (%)
1996/1997	116.144	119.266	235.410	-
1997/1998	123.771	112.904	236.675	0,54
1998/1999	163.676	130.383	294.059	24,25
1999/2000	130.518	207.396	337.914	14,91
2000	142.665	139.038	281.703	-16,63
2001	356.039	213.859	569.898	102,30
2002	421.526	270.634	692.160	21,45
2003	384.860	467.491	852.351	23,14
2004	563.174	577.920	1.141.094	33,87
2005	813.882	311.890	1.125.772	-1,34
2006	996.091	745.496	1.741.587	54,70

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan. *Sumatera Selatan Dalam Angka*. Data diolah.

Pengeluaran pemerintah Propinsi Sumatera Selatan meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2000 dan 2005 terjadi penurunan pengeluaran pemerintah masing masing sebesar minus 16,63 persen dan minus 1,34 persen. Peningkatan pertumbuhan pengeluaran pemerintah paling tinggi terjadi pada tahun 2001 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 102,3 persen. Ini disebabkan terjadi peningkatan baik dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu unsur APBD yang bersumber dari kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan akan menjadi sumber dana atau pendapatan yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di suatu daerah dan ini berdampak juga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat akan mendorong

kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan suatu daerah. Pengeluaran pemerintah yang meningkat ditujukan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerahnya, pembangunan tersebut pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan pungutan pajak meningkat meskipun tarifnya mungkin tidak berubah karena pemerintah akan berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, sehingga kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan pula penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara penerimaan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagaimana hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengembangan teori melalui model yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah.

2. Manfaat Operasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hadi. 2005. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kabupaten dan Kota Se-Jawa Bali, *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Padang: K-ASPP.
- Agustini, Triana. 2007. Kausalitas Antara Sumber-Sumber PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kota Palembang, *Tesis*. Palembang: PPS UNSRI. Tidak dipublikasikan.
- Arief, Sritua. 2007. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI-PRESS.
- Arsyad, Lincoln. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2006. *Sumatera Selatan dalam Angka*. Palembang: BPS.
- Desdhasari, Aidila. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang, *Tesis*. Palembang: PPS UNSRI. Tidak dipublikasikan.
- Dornbusch, Rudiger dan Fischer, Stanley. 1978. *Macroeconomics*. United State of America: McGraw-Hill, Inc.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Hasibuan, Nurimansjah. 2001. *Teori dalam Penelitian Ekonomi*. Palembang: Yadena-3.
- Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Jhingan, M. L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi Pertama. Jakarta: CV. Rajawali.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2000. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Manurung, Jonni J, dkk. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Marzuki, Ervan. 2004. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, *Tesis*. Palembang: PPS UNSRI. Tidak dipublikasikan.

- Musgrave, RA, dan Musgrave, PB. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Usman, Hardius. 2006. *Analisis Ekonomi dan Keuangan Menggunakan Ekonometri*. Jakarta: FEUI.
- Rafinus, Bobby H dan Gumanti, Aprizul. 2005. *Sistem Pengelolaan Pembangunan Bahan Ajar DIKLATPIM Tingkat III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Robert, Nuansa. 2006. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Skripsi*. Inderalaya: UNSRI. Tidak dipublikasikan.
- Shah, Anwar. 2003. *Ensuring Accountability When There is No Bottom Line*, Vol. 1 of Handbook on Public Sector Performances Reviews. Washington D.C: The World bank.
- Siregar, Masjidin. 1999. Kausalitas Antara Ekspor dan PDB di Indonesia 1971-1997, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVII No. 3.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perencanaan Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, MP. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, dalam Sepuluh Undang-Undang 2004. Jakarta: CV. Eko jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, dalam Sepuluh Undang-Undang 2004. Jakarta: CV. Eko jaya.
- Yuwono, Soni, dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayu Media.